
**PEKERJA SOSIAL ANTI PENINDASAN LEVEL STRUKTURAL
(Sudut Pandang Pekerja Sosial Terkait Kasus Penyelewengan Dana Bantuan
Sosial COVID-19 Oleh Menteri Sosial Juliari Batubara)**

Oleh

Nola Yolanda Oktaviola¹, Subaidi²

^{1,2}Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ¹Nolayolandaktaviola931@gmail.com, ²subaidi@uin-suka.ac.id

Article History:

Received: 02-04-2022

Revised: 16-04-2022

Accepted: 26-05-2022

Keywords:

Korupsi, KPK, Pekerja Sosial

Abstract: *Penanganan setiap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh satu lembaga independen yang disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Bukanlah suatu beban amanah yang mudah bagi KPK sejak reformasi melakukan pemberantasan korupsi di negara seluas Indonesia, tentunya ini amanat yang sangatlah berat. Pasalnya KPK dalam hal ini terkadang harus berhadapan langsung dengan para pemangku jabatan-jabatan penting yang ada di jajaran pemerintahan. Ditambah lagi apabila suatu kasus tertentu yang memiliki hubungan dengan aparat penegakan hukum, tentunya akan sulit bagi KPK untuk tetap dapat berdiri tegak dalam menjalankan amanat UUD 1945. Independensi, transparansi serta profesionalitas dalam menjalankan tugas merupakan nilai luhur yang harus terus dijaga oleh KPK. Terlebih komponen yang bergerak menjadi bagian dalam menjalankan fungsi KPK berasal dari berbagai kalangan ada, tentunya kinerja dan komitmen dari KPK untuk menegakkan korupsi akan selalu menjadi sorotan dari masyarakat luas. Kasus korupsi di jajaran menteri selama pemerintahan presiden Jokowi terbilang banyak jumlahnya, secara keseluruhan menteri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan menteri yang berasal dari berbagai afiliasi partai besar di Indonesia. Pekerjaan sosial anti penindasan pada level structural berfokus pada perlawanan dan perubahan terhadap institusi sosial, kebijakan, hukum, ekonomi, dan sistem politik. Perubahan structural tersebut ditentukan dengan kontribusi terhadap perubahan fundamengal atau transformasi sistem sosial, ekonomi.*

PENDAHULUAN

Program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat kelas bawah yang terdampak efek Covid-19 secara langsung. Namun ternyata bantuan dari pemerintah ini dimanfaatkan oleh

beberapa pihak demi keuntungan pribadi. Tercatat pada tanggal 5 Desember 2020, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan korupsi dana bantuan Kemensos untuk masyarakat dengan total mencapai lebih dari 20 Milyar. Hal ini tentu saja langsung menjadi sorotan utama media di Indonesia. Media sebagai ujung tombak utama informasi tentunya akan mengulas mengenai kasus korupsi ini. Berbagai media cetak maupun media online beramai-ramai membahas kasus korupsi serta penangkapan Juliari Batubara.¹

Masalah korupsi yang melibatkan aparaturnya telah berkali-kali menjadi tajuk utama pemberitaan di media massa cetak maupun media online di Indonesia.² *Headline* tentang korupsi oleh pejabat pemerintahan yang terdapat di media massa telah memberikan penegasan bahwa masalah korupsi merupakan bagian dari patologi sosial masyarakat Indonesia yang perlu diperangi secara lebih serius baik dengan menggunakan instrumen hukum, agama, maupun sosial budaya. Di sisi lain, korupsi sulit untuk dilacak dan terdeteksi secara empiris dikarenakan ada “tertutup” oleh suatu kepentingan yang saling berkaitan di antara pelaku dengan sistem penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan.³ Kompas.com tercatat sebagai media online pertama yang menulis mengenai kasus korupsi Juliari Batubara. Pada tanggal; 6 Desember 2020 pukul 09.23 WIB, Kompas menuliskan artikel bertajuk “Juliari Batubara Jadi Tersangka, Total 4 Menteri di Era Jokowi yang Tersandung Dugaan Kasus Korupsi”. Menyusul portal berita lainnya seperti Detik.com, Tribunnews.com, Suara.com, yang menuliskan atrtikel serupa. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 05.31 WIB Kompas.com kembali menjadi media online pertama yang mengabarkan kemajuan penangkapan Juliari Batubara dengan menyajikan artikel berjudul “KPK Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Mensos Juliari Batubara Sejak Juli 2020”.⁴

Dengan banyaknya berita yang beredar mengenai kasus penangkapan Juliari Batubara, masyarakat sebagai konsumen media tentunya harus berpartisipasi aktif dengan lebih selektif dalam menyaring berbagai informasi yang disajikan oleh situs berita online. Karena media massa memiliki pengaruh untuk menjadi opini publik (Pamuji, 2020). Media massa memegang peranan penting karena media massa pada umumnya terlibat dalam pembuatan wacana politik, serta mengonstruksi maupun mendekonstruksi berbagai peristiwa politik, termasuk salah satunya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Dengan banyaknya media massa di Indonesia, tentunya setiap media memiliki karakter dan gaya penulisan yang berbeda-beda, tidak terkecuali media online seperti Kompas.com. Alexa.com perusahaan yang menyediakan traffic web dan ranking web menyebutkan bahwa Kompas.com merupakan media elektronik yang paling banyak dikunjungi ketiga setelah Okezone.com dan Tribunnews.com. Kompas.com juga memiliki

¹ Susilo, D. Perempuan dan Korupsi: Wacana Media dalam Berita Tindak Pidana, (2016). Hlm 4

² Ibid.,

³ Widoyoko, D. Gender dan Korupsi: Mencari Titik Temu antara Gerakan Anti Korupsi dan gerakan Perempuan. *Jurnal Perempuan*, (2012). hlm 17

⁴ Kompas. (2020, Desember). Ditetapkan Tersangka Oleh KPK, Ini Sepak Terjang Juliari Batubara. *Kompas*.

51,4% traffic dalam setiap bulannya. Selain itu berdasarkan pengamatan penulis,⁵

Kompas.com merupakan media elektronik yang terpercaya karena bekerja sama dengan TurnBackHoax.id untuk melakukan pengecekan berita dan validasi setiap isu yang ada. Kompas.com juga merupakan media online yang paling terdepan dalam menayangkan perkembangan berita mengenai penangkapan Juliari Batubara oleh KPK. Oleh karena itu dalam artikel ini penulis ingin menganalisis framing pemberitaan mengenai tertangkapnya Juliari Batubara dalam kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 pada media online Kompas.com.

Istilah korupsi tampaknya bukanlah istilah yang asing di telinga masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan karena kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tidak terhitung jumlahnya. Dimulai dari kalangan pejabat di lembaga legislatif, eksekutif bahkan kasus korupsi juga kerap terjadi pada para pejabat di lembaga yudikatif. Kasus-kasus yang terjadi pada kalangan elite ini

sangat mencengangkan, pasalnya para pejabat yang memegang tampuk kekuasaan yang semestinya bekerja menunaikan amanat dari rakyat kini menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan. Kekuasaan dijadikan alat untuk menindas masyarakat kecil, sampai pada tujuan akhirnya adalah kekuasaan digunakan sebagai alat untuk memperkaya diri, keluarga bahkan untuk memperkaya partai pengusung jabatan strategis yang dimiliki.

Tidak berhenti pada lembaga-lembaga besar seperti lembaga legislatif, eksekutif bahkan pada lembaga yudikatif saja, kasus korupsi juga kerap terjadi di jajaran para menteri yang merupakan pembantu presiden di lembaga eksekutif. Adapun tugas pokok para menteri adalah membantu presiden dalam melaksanakan tugas dan amanat yang diberikan oleh rakyat. Menteri yang dipilih ada yang berasal dari afiliasi partai tertentu bahkan dan ada juga dari kalangan non partai. Kualifikasi yang ditetapkan berdasarkan hubungan politik atau memang mereka yang memiliki kapasitas di bidangnya. Akan tetapi janji-janji politik selama masa kampanye memang tidak dapat dihindari, kursi-kursi serta jabatan strategis yang telah dijanjikan sebelum pilpres haruslah ditepati. Hal inilah yang menjadi sebab kasus korupsi terjadi di kalangan para menteri dan juga pada kalangan pejabat strategis di negara Indonesia.

Penanganan setiap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh satu lembaga independen yang disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Bukanlah suatu beban amanah yang mudah bagi KPK sejak reformasi melakukan pemberantasan korupsi di negara seluas Indonesia, tentunya ini amanat yang sangatlah berat. Pasalnya KPK dalam hal ini terkadang harus berhadapan langsung dengan para pemangku jabatan-jabatan penting yang ada di jajaran pemerintahan. Ditambah lagi apabila suatu kasus tertentu yang memiliki hubungan dengan aparat penegakan hukum, tentunya akan sulit bagi KPK untuk tetap dapat berdiri tegak dalam menjalankan amanat UUD 1945. Independensi, transparansi serta profesionalitas dalam menjalankan tugas merupakan nilai luhur yang harus terus dijaga oleh KPK. Terlebih komponen yang bergerak menjadi bagian dalam menjalankan fungsi KPK berasal dari berbagai kalangan ada, tentunya kinerja dan komitmen dari KPK

⁵ Kompas. (2020). Mensos Juliari Batubara Diduga Korupsi Bansos Covid-19, Kemensos : Kaget dan Terpukul.

untuk menegakkan korupsi akan selalu menjadi sorotan dari masyarakat luas. Kasus korupsi di jajaran menteri selama pemerintahan presiden Jokowi terbilang banyak jumlahnya, secara keseluruhan menteri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan menteri yang berasal dari berbagai afiliasi partai besar di Indonesia.

Sebagaimana dengan kasus yang sangat familiar Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka. Miris dengan kenyataan ini, korupsi seperti menjadi budaya baru dalam tataran pemangku jabatan negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat yang terdampak pandemi, malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pejabat tanpa melihat kehalalan dalam mendapatkannya. Negara harus membuat aturan baru yang mampu menghilangkan korupsi yang menggurita, serta menegakkan hukum positif yang berkeadilan dan tegas. Dengan demikian, akan memberi efek jera bagi pelaku korupsi. Seharusnya, para pemangku jabatan menghindarkan diri dari praktik korupsi. Maka sejatinya, sistem dengan aturan yang berasal dari Sang Khalik yang mampu menyelesaikan permasalahan korupsi ini. (Mensos Korupsi Dana Bansos, Budaya Pejabat Negara (Mensos Korupsi Dana Bansos, Budaya Pejabat Negara, 2020).⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh menghentikan penyidikan kasus korupsi proyek bantuan sosial (bansos) hanya pada mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Kesaksian para pelaku dan bukti-bukti lain menunjukkan bahwa Juliari tidak menikmati sendiri fulus ratusan miliar rupiah hasil korupsinya. Ada indikasi kuat sejumlah fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ikut menyalurkan duit haram itu untuk pemenangan beberapa calon dalam pemilihan kepala daerah yang baru usai. Karena itu, penahanan Juliari pada 6 Desember lalu harus dijadikan pintu masuk untuk mengungkap lebar jejaring pelaku korupsi dana bansos. KPK tidak boleh gentar, meski berhadapan dengan partai penguasa. Korupsi dana bantuan untuk masyarakat yang terempas krisis ekonomi akibat pandemi jelas merupakan kejahatan level tertinggi. Pelakunya tak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga mengancam hidup banyak orang. Karena itulah berbagai tanda ketidakberesan penyaluran bantuan sosial seolah-olah diabaikan begitu saja. Sistem pencegahan korupsi tak berjalan. Publik patut mengapresiasi kerja keras penyidik komisi antikorupsi yang telaten mengumpulkan bukti demi bukti yang berujung pada penahanan Juliari (Jangan Berhenti Di Menteri Juliari, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Karakteristik utama dalam metode penelitian kualitatif adalah fokus pada makna. Sehingga penelitian ini mengabaikan hal-hal yang memiliki persamaan, sebaliknya mengulas bagaimana pandangan hidup manusia yang berbeda-beda. Hal ini tidak lain karena fakta yang mengatakan bahwa makna bagi setiap orangpun berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis framing Robert N. Entman. Model framing Entman memiliki empat poin utama yaitu: define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation (Listiorini et al., 2019; Malik, 2019). Define problems merupakan penekanan bingkai utama di mana wartawan sebagai penulis berita memaknai

⁶ CNN Indonesia (2020) "Mensos Tersangka Korupsi Bansos , Netizen Geram". <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201206074026-192-578509/mensos-tersangka-korupsi-bansos-netizen-geram>

suatu peristiwa. Diagnose cause bertujuan mendefinisikan siapa yang menjadi pelaku serta siapa yang menjadi korban dalam sebuah peristiwa. Make moral judgement merupakan sanggahan maupun pembenaran argumentasi pada penjelasan masalah yang telah dibentuk. Sementara treatment recommendation digunakan untuk menilai bagaimana jalan untuk menyelesaikan masalah, Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dokumentasi pemberitaan kasus penangkapan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara di media online. Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan cara mendokumentasikan berita mengenai pemberitaan yang berkaitan dengan kasus penangkapan Juliari Batubara di Kompas.com pada bulan Desember 2020, artikel tersebut kemudian dipilih sesuai dengan tema yang ditetapkan. Kemudian, data serta teks berita yang telah dianalisis menggunakan framing model Entman. Sementara data sekunder dilakukan dengan mencari data dari berbagai sumber seperti jurnal, penelitian terdahulu, buku, dan bahan literatur lainnya untuk dijadikan acuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah KKN sudah tidak asing lagi terdengar di negara kita Indonesia dengan banyaknya ditemui kasus-kasus dilapangan, pemberitaan penangkapan melalui media oleh KPK sebagai lembaga independen dalam menangani masalah Korupsi di negara Indonesia. Saat ini negara-negara didunia termasuk indonesia mengalami masalah bersama yaitu Covid-19 yang ada dalam penanganannya pemerintah berusaha untuk tetap memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya dengan berbagai macam perlindungan sosial salah satunya ialah pemberian Bantuan Sosial (BANSOS) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Tetapi dengan adanya masalah Covid-19 ini malah menjadi tempat usaha untuk para petinggi-petinggi pemerintahan dalam melancarkan hawa nafsu mereka dengan melakukan KKN, yang terdengar ramai saat ini yaitu dengan adanya kasus Korupsi Bansos dikalangan Kementerian Sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial.

Berdasarkan Jurnal Integritas KPK (2020) menyebutkan segala macam laporan atas keluhan penyaluran bansos sebanyak 100 Jiwa bantuan tidak dibagikan oleh Aparat kepada penerima bantuan, 369 Jiwa tidak menerima bansos meskipun terdaftar, 9 Jiwa ada yang dapat bantuan lebih dari satu, 73 Jiwa bantuan dana yang nominalnya tidak sesuai dari yang seharusnya diterima, 5 Jiwa seharusnya tidak menerima bantuan tapi mendapatkannya, 45 penerima aktif 287 topik lainnya 6 bantuan yang diterima kualitasnya (keluhan berasal dari 784 pelapor yang diajukan kepada 243 pemda terdiri dari 19 pemerintah provinsi dan 224 pemerintah kabupaten/kota).

Sejak awal penyaluran dana Bansos ini memiliki berbagai permasalahan mulai dari data penerima hingga saat penyaluran bahkan ada oknum memanfaatkan kondisi ini dengan meminta uang tambahan untuk diberikan sembako ini. dalam hal ini KPK menetapkan Lima orang tersangka dalam kasus Pelewengan dana Bansos yaitu JPB MJS, Dan AW sebagai penerima AIM dan HS. Salah satunya ialah mantan Menteri Sosial RI Inisial J yang melakukan kasus korupsi paket dana bansos.

Pertama berita yang ditulis nasional.tempo.co

“Dalam sidang tipikor senin 8 maret lalu pembuat komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako covid-19 pada direktorat perlindungan sosial korban bencana sosial kementerian sosial matheus joko santoso mengungkapkan bahwa juliari batubara menargetkan penerimaan 35 miliar dari pengadaan paket bantuan

sosial. Ia bersaksi untuk dua orang terdakwa yaitu Harry Van Sidabukke yang didakwa menyuap juliari batubara senilai 1,28 miliar dan Ardian Iskandar yang didakwa memberikan suap senilai 1,95 miliar terkait penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial sembako covid-19. Adi Wahyono merupakan kuasa pengguna anggaran satuan kerja kantor pusat Kementerian Sosial tahun 2020 dipanggil pak menteri dan diminta ada fee Rp. 10.000 per pakatnya”

Kedua berita yang ditulis CNN. Indonesia

“Juliari Peter Batubara disinyalir menerima total 17 miliar dari dua paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid 19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020 jumlah itu diduga merupakan akumulasi dari penerimaan fee Rp. 10.000 per paket sembako selain itu Juliari juga disebut secara khusus ditenggarai membentuk tim khusus untuk memilih vendor atau perusahaan penyedia bahan pokok, penyedia goodie bag, hingga jasa pengiriman bantuan sampai ke kelompok penerima manfaat”

Melihat dari paparan dua berita di atas maka cukup jelas bahwasannya mantan menteri sosial Juliari terbukti bersalah dengan kasus korupsi penyelewengan dana bansos covid-19 hal ini terlihat dari Juliari menerima beberapa suap dalam menyediakan keperluan paket sembako ini dan meminta bayaran lagi kepada penerima agar bisa mendapatkan bansos ini. Jelas penulis melihat hal ini merupakan sebuah kekerasan tidak langsung yang berupa penindasan terhadap kaum lemah oleh kaum yang memiliki kekuasaan.

Landasan Hukum

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan sesuatu hal yang menjadi permasalahan di berbagai negara tanpa terkecuali negara Indonesia. Salah satu yang marak terjadi tentang kasus Korupsi ini setelah sempat heboh di kalangan masyarakat yaitu kasus korupsi dana Bansos. Bansos yang diperuntukkan kepada penerima manfaat berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan secara undang-undang tetapi masih adanya juga yang mencari celah dan kesempatan untuk melakukan hal ini, padahal regulasi atau hukum yang berlaku di negara kita sudah jelas sebagai berikut misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahkan dalam beberapa pasal KUHP terdapat beberapa kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati yang dikutip dari kompas.com 7 Desember 2020

“Majelis Hukum Dan Ham Pp Muhammadiyah Mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berani menerapkan pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor) dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19 yang menjerat menteri sosial Juliari Batubara pasal tersebut mengatur kemungkinan penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi yang merugikan negara di tengah bencana”.

Peran Pekerjaan Sosial Terhadap Kasus Operasi Korupsi Dana Bansos Covid-19 di kalangan Kementerian Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pertolongan guna meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat, apalagi pada masa Pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat secara umum merasakan dampaknya mulai dari hilangnya mata pencaharian, kurangnya pendapatan, hingga menurunkan akses hubungan sosial masyarakat. Menurut Zastrow dalam bukunya *Introducing To Social Work And Social Welfare* (1996;67-68)

menjelaskan peran pekerjaan sosial mulai dari Enabler sebagai pemungkin perubahan, Broker sebagai penghubung, Advocate sebagai pembela, Mediator sebagai penengah, Negotiator sebagai penghubung pikiran, Educator sebagai pengajar, Initiator, Empower sebagai pemberdaya, Coordinator, Researcher, Group Fasilitator, Public Speaker

Dalam permasalahan yang tengah dialami negri indonesia yaitu dengan mewabahnya Virus Corana saat ini elemen tengah berusaha untuk menyelsaikan atau menanggulangi bergagai dampak tidak terkecualai oleh Pekerja sosial. Disini peran pekerja sosial dalam melakukan berbagai Intervensi dengan salah contoh peran Pekerjaan sosial ini adalah

1. Peran Peksos dalam Bantuan Sosial, disini pekerja sosial diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat dalam segi bantuan sosial dan mereka diharppkan mampu untuk memberikan bantuan tersebut kepda orang yang tepat untuk itu para pekerja sosial diaharapkan dapat melakukan berbagai metode dan praktek dalam hal bantuan sosial ini.
2. Peran pekerja sosial dalam mengvaluasi berbagai kebijakan terkait dengan dampak wabah Virus Corona ini pada bidang sosial kemasayarakatan, disini diharpkan pekerja sosial mampu untuk mengevaluasi dan memberikan sebuah pendapat baru terkait dengan solusi dari penanagan wabah Virus Corona ini.
3. Peran pekerja sosial sebagai penerima aspirasi dari masyarakat, dalam hal ini pekerja sosial sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan .

Maka berdasarkan contoh kasus tersebut, maka penulis ini memberikan persepsi atau gambaran mereka sebagai pekerjaan sosial dalam kasus penyelewengan dana bansos oleh mantan menteri sosial walaupun dalam penanganan pelaku bukan merupakan hak dari pekerjaan soosial tetapi pekerja sosial disini mampu membendung dampak yang terjadi pada masyarakat dengan melakukan peran-peran sebagai berikut :

1. Broker

Peran pertama yang harus dilakukan dalam melihat kasus penyelewengan dana bansos oleh mantan menteri sosial J mencoba mempereat hubungan yang ada dalam masyarakat pekerjaan sosial mencoba menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan mencoba meperbaiki pendapat-pendapat yang tidak benar yang dapat menimbulkan hooaks lagi dikalangan masyarakat, mencoba menjadi pengubung atas keluhan yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan bantuan sosial ini kepada pemerintah serta mencoba mengelambalikan kepercayaan masyaarakat atau publik terhadap pemerintah karena adanya kasus korupsi oleh mantan menteri sosial J ini banyak membuat masyarakat sudah semakin tidak percaya yakin akan adanya permainan dana bansos Covid-19

2. Advokat

Pekerjaan sosial bisa menjadi Advokat dalam hal dapat mengawasi jalannya kebijakan yang terapkan dimasyarakat tersebut disini pekerjaan sosial mencoba untuk mencari tau serta mengadvokasi lebih dalam terkait permasalahan bansos yang tidak sampai kemasyarakat serta mencoba melihat apakah fenomena kasus Bansos Covid-19 ini murni hanya terjadi karena intruksi dari mantan menteri sosial atau ada oknum-oknum kecil yang menjadi penyalur dilapangan mencoba mencekik rakyat serta menambah beban mereka dalam proses penyaluran.

Menurut Johnson (dalam Pekei 2019 ; 71) menerangkan mengenai bidang-bidang pekerjaan sosial salah satunya ialah pelayanan sosial dan tindakan pelecahan(Social Service

and Substansi Abuse), serta peradilan kejahatan dan kenakalan (Criminal And Juvenile Justice). Hal ini membuktikan bahwa sebagai seorang pekerjaan sosial juga harus turut aktif dalam melihat permasalahan-permasalahan bukan hanya dalam sagi mikro, dan mezzo tetapi kita juga harus mampu melihat dan menganalisa permasalahan dalam segi makro nya.

3. Empowerer

Disini pekerja sosial bekerja fokus dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar mampu memiliki daya untuk dapat bertahan hidup atau mengembangkan kehidupannya. Penulis mencoba mengaitkan dengan kasus Korupsi dana bansos yang sudah terjadi dan berdampak kepada masyarakat para pekerja sosial bisa melakukan hal lain dengan mencoba melakukan pemberdayaan dengan pemanfaatan potensi yang ada dimasyarakat tersebut jadi tidak akan berharap terus dengan bantuan sosial yang kemungkinana ada kasus korupsi didalmnya sehingga masyarakat disini bisa mandiri contohnya saja sebuah perkampungan kumuh dan kotor penuh sampah bisa dibuat berdaya dengan mencoba mengelola sampah-sampah dari orgnaik hingga non organik seperti menjadi seni atau keterampilan tangan yang bernilai jual menjadi pupuk dan lain sebagainya sehingga melihat kasus seperti menteri sosial J ini masyarakat sudah tidak takut akan kebutuhan yang tidak terpenuhi

4. Educator

Peran terakhir menurut penulis ialah pekerjaan sosial bisa jadi sebagaii pengajar yang bukan hanya memberikan pengajaran berupa ilmu tetapi juga bisa menjadi sebagai pemberi informasi kepada masyarakat agar hoax juga bisa dicegah beredar banyak dimasyarakat mulai dari memberikan informasi terkait pandemiCovid-19 dengan adanya dampak yang dirasakan dengan benar agar tidak menimbulkan kekacauan, pemberian informasi terkait mekanisme penyaluran bansos agar tidak terjadi kesalahpahaman, pemberia informasi menenai vaksinasi kepada mayarakat dan lain sebagainya.

Kemudian, strategi pekerjaan sosial dalam menganalisis masalah mengenai penyelewengan dana Bansos dalam bukunya Mulaly yang membahas mengenai Strategi penindasan dilevel Struktural :

1. Organisasi-organisasi layanan sosial alternative

Dalam hal ini peksos dalam hal penindasan ini bertransformasi sosial dengan membangun, mengembangkan, dan mendukung organisasi yang melayani maupunmengelola kelompok antir penindasan. Dalam hal melihat kasus penyelewengan dana bansos oleh menteri sosial Juliari Batubara itu pekerjaan sosial berstrategi meyasar pada kelompok yang merasakan dampak yang sangat berat akibatnya peksos mencovba melakukan layanan seperti pemberian pemberdayaan kepada kelompok ini, serta melakukan beberapa intervensi lain agar mereka dapat bisa menyelesaikan dampak akibatnya dari penyelewengan dana bansos ini.

2. Gerakan sosial baru dan mengembangkan Koalisi

Gerakan sosial perlu dalam proses penyelesaian sebuah masalah baik itu menyangkut individu ataupun secara universal hal penting karena dengan membangun koalisi dapat menciptakan solidaritas yang timbal balik dan dapat mewujudkan persatuan dan keberhasilan penciptaan gerakan berbasis luar.

3. Praktik Kritik Kebijakan Sosial

Disini dalam hal penyelengan dana bansos mencoba melihat masalah ini sebagai gejala

yang saling berkaitan bukan hanya berdampak saja pada masyarakat tetapi melihat masalah ini dari berbagai sektor dan sudut pandang dari kebijakan itu sendiri dasar hukum, peta konsep penerapannya dimasyarakat, hingga keterbukaan soal dana bantuan tersebut secara universal hingga perorangan.

4. Revitalisasi sektor politik

Terkait dengan hal politik dalam masalah penyelengan dana bansos ini pasti didalamnya ada karena melihat pelaku yang melakukan adalah pejabat negara sendiri sehingga kekuatan politik bagi pekerjaan sosial juga penting sehingga pekerjaan sosial juga harus mampu atau mempunyai relasi atau hubungan –hubungan dengan politik karena dalam hal para pekerjaan sosial harus mampu melihat masalah penyelwengan dan bansos ini dalam ranah politik juga.

KESIMPULAN

Pekerja Sosial Anti Penindasan Dilevel Structural sudut pandang pekerja sosial terkait kasus penyelewengan dana bansos covid-19 oleh Menteri Sosial Juliane sebagaimana juga sangat berdampak terhadap masyarakat atas penyelewengan dana bansos yaitu dampak sosial ekonomi dan budaya. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan sesuatu hal yang menjadi permasalahan di berbagai negara tanpa terkecuali negara Indonesia. Salah satu yang marak terjadi tentang kasus Korupsi ini setelah sempat heboh di kalangan masyarakat yaitu kasus korupsi dana Bansos. Dalam kasus ini adanya strategi pekerja sosial dalam menganalisis masalah mengenai kasus penyelewengan dana bansos yaitu strategi penindasan dilevel structural: organisasi-organisasi layanan sosial alternative, gerakan sosial baru mengembangkan koalisi, praktik kritik kebijakan sosial, revitalitas sector politik.

Dalam peran pekerja sosial dalam melakukan berbagai Intervensi dengan salah contoh peran Pekerjaan sosial ini adalah peran peksos dalam bantuan sosial, disini pekerja sosial diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat dalam segi bantuan sosial dan mereka diharppkan mampu untuk memberikan bantuan tersebut kepda orang yang tepat untuk itu para pekerja sosial diharapkan dapat melakukan berbagai metode dan praktek dalam hal bantuan sosial ini. Peran pekerja sosial dalam mengvaluasi berbagai kebijakan terkait dengan dampak wabah Virus Corona ini pada bidang sosial kemasayarakatan, disini diharpkan pekerja sosial mampu untuk mengevaluasi dan memberikan sebuah pendapat baru terkait dengan solusi dari penanganan wabah Virus Corona ini. Peran pekerja sosial sebagai penerima aspirasi dari masyarakat, dalam hal ini pekerja sosial sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan .

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anzari dan Fariza, (2021). "Analisis Framing Pemberitaan Penangkapan Juliari Batubara Dalam Korupsi Dana Bansos Covid-19 pada Kompas.com". Jurnal Kajian Media, Vol.5 No.1 Hal39-49
- [2] Bondan, G. L. B. (2019). *Tindak pidana korupsi dan komisi pemberantasan korupsi*. 85. www.kpk.go.id
- [3] CNN Indonesia (2020) "Mensos Tersangka Korupsi Bansos , Netizen Geram". <https://www.cnnindonesi.com/teknologi/20201206074026-192-578509/mensos-tersangka-korupsi-bansos-netizen-geram>
- [4] Gallego, V., Nishiura, H., Sah, R., & Rodriguez-Morales, A. J. (2020). The COVID-19

- outbreak and implications for the Tokyo 2020 Summer Olympic Games. In *Travel Medicine and Infectious Disease*. Di akses pada tanggal 14 April 2022
- [5] Gorbiano, M. I. (2020, April). Up to 9 million people to fall into poverty, unemployment as
- [6] COVID-19 hits: Sri Mulyani This article was published in thejakartapost.com with the
- [7] title "Up to 9 million people to fall into poverty, unemployment as COVID-19 hits: Sri
- [8] Mulyani". Click to rea. *The Jakarta Post* Di akses pada tanggal 14 April 2022
- [9] <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1444170/kasus-korupsi-bansos-juliari-batubara-disebut-mengelola-16-juta-paket>
- [10] Kompas. (2020). Mensos Juliari Batubara Diduga Korupsi Bansos Covid-19, Kemensos : Kaget dan Terpukul. *Kompas*. Di akses pada tanggal 14 April 2022
- [11] Kompas. (2020b, December). Ditetapkan Tersangka Oleh KPK, Ini Sepak Terjang Juliari Batubara. *Kompas*. Di akses pada tanggal 14 April 2022
- [12] Kompas. (2020c, December). Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Berapa Gaji Menteri Juliari
- [13] Batubara? *Kompas*. Di akses pada tanggal 14 April 2022
- [14] Komisi Pemberantasan Korupsi, (2016). "Dampak Sosial Korupsi". Modul Integritas Bisnis: Jakarta
- [15] Komisi Pemberantasan Korupsi, (2020). "Mengawal Kuncuran Deras Dana Covid-19". Jurnal Anti Korupsi. Vol.05 No.1
- [16] Kurniadi, N. T. P. M. E. S. I. S. U. Y., Karsona, A. I. S. A. M., Bura, G. L. B. R. O., & Wibowo, A. P. (2011). *Anti-Korupsi Anti-Korupsi Pendidikan*.
- [17] Mullaly, B. (2002). *Challenging Oppression : A Critical Social Work Approach*. Oxford Univercity Press.
- [18] Nasional Tempo. (2020)"Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Disebut Mengelola 16 Juta Paket"
- [19] Pekei Amoye, (2019). "Pekerjaan Sosial Dan Penanganan Masalah Sosial". Intrans Publishing : Malang
- [20] Suharto, E. (2009). *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar* (Cetakan I). Pustaka Pelajar
- [21] Susilo, D. (2016). Perempuan dan Korupsi: Wacana Media dalam Berita Tindak Pidana
- [22] Korupsi Perempuan. In G. Arivia (Ed.), *INTERNATIONAL CONFERENCE OF FEMINISM: Intersecting Identity, Agency and Politics (20 years Jurnal Perempuan)* Yayasan Jurnal Perempuan. <https://ssrn.com/abstract=2907291>.
- [23] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- [24] Yamamura, E., Andreas, R & Katsaiti, M.S (2012) "does corruption affect suicide? Econometric evidence from OECD Countries", *Atl Econ J* 40 : 133-145
- [25] Widoyoko, D. (2012). Gender dan Korupsi: Mencari Titik Temu antara Gerakan Anti Korupsi dan gerakan Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 17(1).
- [26] Zastrow, Charles. (1996). *Introducing To Social Work and social welfare* (6th edition). California : brooks/cole publishing company.